

**PENGATURAN ASURANSI BERBASIS INVESTASI DALAM KAITANNYA
DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DI
INDONESIA**

DISERTASI



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2017**

PENGATURAN ASURANSI BERBASIS INVESTASI DALAM KAITANNYA DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS DI INDONESIA

Wetria Fauzi, 1430112005, Program Doktorat Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas

Abstrak

Konsep asuransi dalam perundang-undangan asuransi menyatakan bahwa asuransi merupakan lembaga pengalihan risiko. Meskipun sudah lahir Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, ternyata undang –undang ini masih mengkonsepkan asuransi sebagai lembaga proteksi, namun di dalam praktiknya terjadi perubahan paradigma fungsi asuransi, tidak hanya sebagai lembaga *transfer of risk* tetapi juga sebagai lembaga investasi, yang menimbulkan persoalan terhadap perlindungan hak pemegang polis. Tujuan Penelitian ini adalah: Untuk mengidentifikasi pengaturan asuransi berbasis investasi di Indonesia, menganalisis perlindungan hukum bagi pemegang polis di Indonesia, serta mengidentifikasi keabsahan asuransi terkait investasi yang dilakukan perusahaan asuransi. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah : pertama, pengaturan asuransi dalam UUPerasuransian bersifat *dual insurance system*. UU Perasuransian yang mengatur dua sistem perasuransian namun pada dasarnya operasionalnya sama tanpa membedakan prinsip dan kelembagaan syariah. Asuransi berbasis investasi tidak ada disebut secara tegas dalam undang-undang perasuransian. Pengaturan asuransi berbasis investasi terdapat pada beberapa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang bukan secara khusus mengatur asuransi berbasis investasi. Perlindungan hukum terhadap pemegang polis secara preventif hukum melindungi pemegang polis melalui pengaturan dalam Undang-Undang dan POJK. Penyelesaian sengketa asuransi berbasis investasi begitu banyak fasilitas yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan, hal ini tidak memberikan kepastian hukum, karena hukum harus dapat menentukan secara tegas dan bersifat konkrit. Alasan validitasi POJK ini adalah karena hubungan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah yang diwujudkan dengan cara seperti yang ditentukan norma lainnya. Pasal 5 ayat 3 UU Perasuransian memberikan ruang gerak dalam rangka lahirnya berbagai jenis produk *hybrid*. Konsep Pengaturan asuransi berbasis investasi yang ideal ke depan adalah pengaturan asuransi berbasis investasi konvensional dalam satu peraturan perundang-undangan, dan asuransi syariah dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Hal yang perlu diatur diantaranya adalah pengesahan kontrak polis asuransi oleh OJK sebelum disetujui pihak pemegang polis, perlu digagas penyelesaian sengketa asuransi yang berkepastian hukum, kewajiban pencantuman klausula dalam polis bahwa penyelesaian sengketa konsumen dilakukan melalui mekanisme penyelesaian non litigasi dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Perasuransian. Pengaturan asuransi berbasis investasi harus memenuhi prinsip kepastian hukum sehingga konsepnya menjadi jelas dan terang, dalam bentuk peraturan perundang-undangan khusus.

Keyword : Asuransi, Investasi, Perlindungan Hukum

ARRANGEMENT OF INVESTMENT-BASED INSURANCE IN RELATION TO LEGAL PROTECTION OF POLICYHOLDERS IN INDONESIA

Wetria Fauzi, 1430112005, Doctoral Program of Law Science, Faculty of Law Andalas
University

Abstract

The concept of insurance in insurance legislation states that insurance is a risk transfer institution. Despite the law No. 40 of 2014 on Insurance, the law is still conceptualize insurance as a protective institution, but in practice there is a change of paradigm of insurance function, not only as an institution of transfer of risk but also as an investment institution which raises the issue of protection of policyholders' rights.. The objectives of the research are: To identify investment-based insurance arrangements in Indonesia, to analyze legal protections for policyholders in Indonesia and to identify the validity of insurance-related insurance investments. The research method used is normative juridical. The results of this study are: first, insurance arrangements in Law No. 40 of 2014 on Insurance is dual system insurance, where in this arrangement there are two concepts of insurance that is conventional insurance and takaful Insurance. Insurance Law which regulates two insurance systems but basically the same operation without differentiating Sharia principles and institutions. Investment-based insurance is not explicitly stated in the insurance law. The arrangement of investment-based insurance is contained in several Financial Services Authority Regulations (POJK) that do not specifically regulate investment-based insurance, until now there has been no special arrangement regarding insurance related to this investment. Secondly, legal protection against investment-based policy-makers on a preventive basis protects the policyholders through regulation in laws and Financial Services Authority Regulations. Settlement of investment-based insurance disputes so many facilities provided by law and regulation, this does not provide legal certainty, because the law must be able to determine firmly and concretely. The reason for POJK validation is because the relationship between higher and lower norms is manifested in the way that other norms determine. Article 5 paragraph 3 of the Insurance Law provides space for the emergence of various types of hybrid products. The concept of ideal investment-based insurance arrangement in the future is the arrangement of conventional investment-based insurance under one legislation, and Takaful in its own laws and regulations. It is necessary to regulate the contract of insurance policy by OJK before it is approved by the policyholder, it is necessary to be initiated the settlement of a legal disputed insurance dispute, the obligation of inclusion of clause in the policy that the settlement of the consumer dispute is done through the mechanism of non-litigation settlement with the Alternative Dispute Settlement Institution (LAPS) Insurance. The arrangement of investment-based insurance must fulfill the principle of legal certainty so that the concept becomes clear and firm, in the form of special legislation.

Keyword: Insurance, Investment, Legal Protection

